

HALAMAN JUDUL SKRIPSI

**LATAR BELAKANG KEPUTUSAN JEPANG MASUK DALAM
KEANGGOTAAN *TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP* (TPP) ERA SHINZO
ABE**

Disusun Guna Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Yulian Hatri Afifa

(20150510125)

Pembimbing:

Ratih Herningtyas S.IP., M.A

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang latar belakang Jepang bergabung dalam keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam guna mengetahui alasan Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan masuk dalam keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP) dan tetap bertahan meskipun Amerika Serikat berencana untuk keluar dari *Trans Pacific Partnership* (TPP). Penelitian ini menggunakan teori aktor rasional. Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menemukan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan untuk masuk dalam keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP) karena dua hal yaitu *Trans Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan peningkatan eksistensi ekonomi Jepang di wilayah Asia Timur dan *Trans Pacific Partnership* (TPP) dapat meningkatkan investasi Jepang.

Keywords: Hubungan Bilateral, Trans Pacific Partnership (TPP), Investasi Jepang, Eksistensi Ekonomi Jepang, Kerjasama Bilateral.

ABSTRACT

This research discuss about Japan reason to joining the Trans Pacific Partenship (TPP). The purpose of this research is to analyze the reason why Prime Minister, Shinzo Abe decided to joining the Trans Pacific Partnership (TPP) and stand even United State plans to exit from Trans Pacific Partnership (TPP). This research use rational actor theory. Based on research that has been hold, the writer found that Prime Minister, Shinzo Abe decided to joining Trans Pacific Partnership (TPP) because two things, first Trans Pacific Partnership (TPP) can increase an existence of Japan's economy in East Asia_ and Trans Pacific Partnership (TPP) can also increase Japan's investment.

Keywords: Billateral Cooperation, Trans Pacific Partnership (TPP), Japan Investment, Japan Existence Economy.

A. PENDAHULUAN

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikannya suatu kepulauan. Tokyo secara *de facto* adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan termasuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja (Lintangsari, 2019).

Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II pada tahun 1945. Amerika Serikat kemudian mengakhiri perlawanan Jepang dengan cara menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kemudian membuat Jepang memasuki periode pendudukan Amerika Serikat (Dasuki, 1963, hal.). Kebijakan Amerika Serikat di Jepang selama masa pendudukannya yaitu pertama, menghancurkan militer yang menjadi penyebab perang; kedua, mengadili pejabat-pejabat perang; ketiga, membersihkan para pemimpin yang telah terbukti bertanggung jawab atas politik agresi; keempat, mengatasi pembayaran ganti rugi perang; kelima, penghancuran industri perang dari perampasan alat-alat perang; keenam, pendemokrasian politik, ekonomi dan pendidikan di Jepang. Hal ini menambah kesengsaraan Jepang, yang berakibat pada muncul permasalahan-permasalahan dan kekacauan dalam berbagai bidang (Dasuki, 1963).

Reformasi perpolitikan dan perekonomian Jepang yang terjadi setelah adanya Reformasi Meiji, dan kebangkitan Jepang paska kekalahan di Perang

Dunia II telah membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan dunia yang baru. Hal ini terlihat dengan semakin aktifnya Jepang dalam kancah hubungan internasional. Jepang turut aktif untuk menjaga perdamaian. Pada bulan Oktober 1956, Jepang mulai menjalin hubungan diplomatik dan penandatanganan pakta perdagangan dengan negara-negara liberal. Kemudian pada bulan Desember 1956, Jepang resmi masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jepang juga bergabung dengan kelompok negara-negara industri utama dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1964 (Soesatro, 1990). Keaktifan Jepang lainnya juga tercermin dengan masuknya Jepang ke dalam beberapa organisasi internasional seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1989, Association of South East Asia Nations (ASEAN), dan The Group of Twenty (G20) (Zakky, 2017). Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika (Lintangsari, 2019).

Setelah berakhirnya era Perang Dunia II, Jepang berhasil meningkatkan pertumbuhannya melalui kerjasama pada bidang Industri dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Jepang menyadari bahwa paska kekalahan perang yang dialaminya, hal utama yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah meningkatkan perekonomian. Jepang melakukan beberapa strategi untuk kembali bangkit dari kealahannya, diantaranya membuka diri dengan negara lain melalui kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Jepang telah berimplikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang industry. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi, berupa teknologi informasi dan komunikasi yang banyak diminati oleh masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Produk-produk Jepang mulai merajai dunia internasional dan bahkan dapat bersaing dengan produk-produk industri yang ada di negara maju. Jepang menyebut tahun 1964 sebagai tahun keemasan atau *golden years*. Hasil yang dicapai menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki perekonomian luar biasa. Ikeda Hayato yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 1960-1964, mengumumkan bahwa Jepang akan menjadi salahsatu negara kaya dan maju. Selama periode ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang meningkat dari US\$ 44,31 miliar dengan pendapatan per kapita US\$ 479 pada

1960 menjadi US\$ 172,2 miliar dengan pendapatan per kapita US\$ 1.669,1 pada 1969 (Agung, 2018).

Upaya Jepang untuk menjaga pertumbuhan ekonominya dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, dengan melibatkan kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Dalam kerjasamanya dengan banyak blok-blok perjanjian perdagangan bebas yang ada di wilayah International, salah satunya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang kemudian membuat Jepang ingin bergabung dalam perjanjian kerja sama ekonomi lainnya yaitu Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Bergabungnya Jepang dalam TPP memiliki harapan agar dapat memperkuat pertumbuhan ekonominya. Perjanjian ini berawal dari perjanjian perdagangan khusus yang bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) yang berawal pada saat forum ekonomi antara 21 negara anggota APEC yang diluncurkan pada tahun 1990-an oleh 5 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Chile, dan Selandia Baru. Kelima negara tersebut melakukan perundingan informal yang membahas tentang pembuatan kerjasama perdagangan di kawasan Asia Pasifik (Elms, 2012). *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kerjasama berstandar tinggi yang berusaha untuk menghapus biaya pajak untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, serta membangun dan memperluas peraturan yang membahas mengenai berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual, investasi asing, dan isu-isu mengenai perdagangan lainnya. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bertujuan untuk meliberalisasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dilihat sebagai alat Amerika Serikat demi kepentingan perdagangan dan keamanan Amerika Serikat, namun disisi lain *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah ancaman bagi China di wilayah Asia-Pasifik.

Negara-negara di Asia sedang dalam proses mengkaji ataupun memperdebatkan tentang pembuatan keputusan, apakah akan bergabung dengan kerjasama atau tidak seperti halnya negara anggota yang sedang mengkaji permasalahan ratifikasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP) (Elms, 2012). Banyak analisis yang berpendapat, negara yang pasti akan bergabung adalah Korea Selatan dan Kolombia, mengingat saat ini kedua negara tersebut terlibat perjanjian

bilateral dengan Amerika Serikat. Beberapa negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan juga Thailand telah menyatakan untuk secara terbuka berminat bergabung setelah perundingan kedua pasca *Trans-Pacific Partnership* (TPP) diratifikasi. Taiwan juga telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam keanggotaan. Jika negara besar di Asia dan Taiwan bergabung, maka pengaruh *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di kawasan Asia Pasifik akan semakin besar. Kerjasama *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan perubahan politik domestik suatu negara dengan mendorong agenda domestik untuk melancarkan akses perdagangan beberapa negara yang berkembang ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, dapat juga menjadi implementasi tujuan Amerika Serikat tentang hak-hak pekerja internasional, perlindungan lingkungan dan pembatasan perdagangan spesies langka.

Jepang pun dihadapkan dilema antara memilih untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan membuka pasarnya secara bebas atau tetap mempertahankan kebijakan proteksionismenya. Meskipun demikian, hingga akhir dinyatakan persetujuan mengenai *Trans-Pacific Partnership* (TPP), Jepang masih teguh mempertahankan kebijakan proteksionismenya, terutama di bidang agrikultur. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor pertanian Jepang sangat dilindungi, di antaranya adalah semakin meningkatnya penduduk Jepang, sehingga memerlukan semakin banyak kebutuhan pangan dan semakin menyempitnya lahan pertanian karena adanya industrialisasi (Harada, 2013). Amerika Serikat sebagai negara yang telah mengajak Jepang untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) kemudian memutuskan untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Karena adanya pergantian kepemimpinan yang semula dipimpin oleh Obama dan sekarang pada kepemimpinan baru digantikan oleh Donald Trump. Padahal, selama pemerintahan Presiden Barack Obama, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kesepakatan perdagangan untuk mengikat mitra dan aliansi perdagangan Amerika Serikat untuk menandingi ekspansi China. Sebanyak 12 anggota TPP merepresentasikan 40% ekonomi dunia. Serta pada kepemimpinan Presiden Barack Obama, Amerika menjadi negara yang terus mendorong keikutsertaan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Sebelumnya Trump telah menyatakan bahwa pada kampanyenya, apabila dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, dia akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian dagang regional *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dalam pandangan Trump ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Amerika Serikat, karena terjadinya peningkatan pengangguran. Trump berjanji untuk mengadakan renegotiasi Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau dikenal dengan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dengan Meksiko dan Kanada. Keputusan eksekutif Trump tentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebenarnya adalah simbolik semata. Pasalnya, kesepakatan itu belum diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik. Trump berulang kali menegaskan, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) berpotensi menimbulkan bencana bagi Amerika Serikat karena mengganggu perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Politikus Partai Demokrat Senator Bernie Sanders, mengatakan kepada BBC, dia mendukung keputusan Trump tersebut (Rai, 2017). Namun, Jepang tetap pada keputusannya untuk bergabung tepat pada tanggal 13 Maret 2013. Shinzo Abe mendeklarasikan niatan pemerintah untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan secara resmi diakui sebagai anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ketika Jepang mengikuti perundingan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di Malaysia untuk pertama kalinya pada tanggal 23 – 25 Juli 2013. Putaran terakhir negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), 5 Oktober 2015 Jepang kemudian menyetujui untuk meningkatkan impornya tapi tetap membatasi impor bagi komoditas sektor agrikultur, yaitu beras (Office of the United States Trade Representative, 2015).

B. Kerangka Pemikiran

Menurut Joshua Goldstein, kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional (Goldstein, 2019). Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta *benefit* untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Dalam melihat model kebijakan

luar negeri suatu negara, maka dapat dilihat berdasarkan level analisis yang akan membantu dari arah mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Level analisis berjumlah tiga, di antaranya ialah:

- a. Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari tingkat individu (pemimpin),
- b. Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari tingkat domestik negara,
- c. Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari tingkat sistem.

Salah satu hal yang paling sering digunakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu '*Rational Decision-Making Model*' ada 3 model di dalamnya yaitu: *Rational Actor Model*, *Organizational Process Models* (OPM), dan *Bureaucratic political models* (BPM).

a. *Rational Actor Model*

Dalam model ini, digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan tersebut digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.

b. *Organizational Process Models* (OPM)

Dalam model ini, Graham T. Allison menjelaskan bahwa organisasi, dalam hal ini kementerian dalam pemerintah, dapat bergerak sendiri sebagai pengambil keputusan. *Organizational Process Models* (OPM) menganggap tujuan dan sasaran dibentuk secara baik, membatasi pilihan, menggunakan standar operasional prosedur (SOP), membuka jalan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh organisasi-organisasi kunci atau lembaga dalam negara, setiap organisasi memiliki masing-masing fungsi dan misi. Serangkaian program dikembangkan demi mencapai tujuan tergantung pada anggaran (dana keuangan). Standar operasional prosedur (SOP) meningkatkan efisiensi dan kinerja, kepuasan yang dihasilkan lebih diutamakan daripada optimalisasi.

c. *Bureaucratic Political Models* (BPM)

Dalam model ini, menjelaskan bahwa unit analisisnya berdasarkan individu yang merupakan kunci pengambilan keputusan berdasarkan pengaruh Birokrasi, tokoh kunci memiliki pengaruh besar dalam menentukan tindakan birokrasinya. *Bureaucratic political models* (BPM) juga merupakan tindakan pemerintah: hasil dari proses tawar-menawar politik di antara pemain kunci, tawar-menawar, dan kompromi hasil dalam kepuasan tidak mengoptimalkan pengambilan keputusan: pemilihan berdasarkan dukungan dan birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi ketika membuat keputusan, permusuhan dan persahabatan terjadi antara birokrasi, serta pendapat pribadi tentang isu-isu yang terjadi, dapat menyimpang sesuai kebutuhan kebijakan publik yang seharusnya diambil.

Untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas, maka saya menggunakan model aktor rasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolitik, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintahan dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu. Seorang analisis dianggap sudah bisa menjelaskan suatu politik luar negeri kalau ia bisa menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sedang dipelajarinya itu merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan (Mohtar, 1994).

Model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan

perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model itu para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Oleh karena itu, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Memang, kalau kita mencoba menganalisis dan menjelaskan mengapa para pembuat keputusan di negeri lain itu melakukan sesuatu, cara paling mudah adalah berasumsi bahwa mereka rasional dan kemudian menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Dalam keadaan ini, kita mencoba untuk mengetahui apa kira-kira tujuan mereka dengan melakukan tindakan tertentu itu. Dalam hal ini kita juga berasumsi bahwa pemerintah negara lain itu monolit, tidak terpecah belah, dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga (Mohtar, 1994).

Asumsi-asumsi tentang perilaku pemerintah yang monolit, perilaku menetapkan pilihan secara rasional dan bertujuan jelas itu dan asumsi tentang tersedianya informasi yang cukup dikritik oleh Allison karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Asumsi-asumsi itu mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokrasinya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik, dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi, politik luar negeri tidak pernah bisa terlepas dari tuntutan politik domestik.

C. Pembahasan

Pasca kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang telah memutuskan untuk memfokuskan pertumbuhannya melalui bidang ekonomi. Kekuatan militer Jepang tidak lagi dapat menjadi kekuatan utama negaranya, sehingga melakukan perpindahan fokus dari militer ke bidang ekonomi untuk menjadi kekuatan bagi negara Jepang. Beberapa strategi yang dilakukan Jepang untuk bangkit, yaitu dengan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, serta bergabung ke dalam beberapa

organisasi internasional, salah satunya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1989. Dengan menjalin kerjasama, Jepang ingin mendapatkan keuntungan bagi negaranya, serta dapat mensejahterakan rakyatnya. Sehingga Jepang pun tidak hanya fokus pada beberapa organisasi internasional, tetapi juga ingin melakukan perjanjian dagang yang dapat berdampak pada kemakmuran ekonomi Jepang.

Dalam pembahasan bab ini, perjanjian dagang yang menjadi fokus utama dan menarik untuk dibahas yaitu bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Hal unik dari perjanjian ini adalah bagaimana tata aturan perjanjian dagang yang ada dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan bagaimana Jepang memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Keputusan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan keputusan yang tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam negeri. Seperti yang kita ketahui *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas multilateral yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe. Beliau mengumumkan keinginannya untuk bergabung ke dalam perundingan perdagangan bebas atau *Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau kemitraan Trans-Pasifik. Keputusan Perdana Menteri Shinzo Abe bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena tujuan dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) itu sendiri adalah menjadikan lautan pasifik sebagai lautan di mana barang, jasa, dan investasi bebas bergerak. Shinzo Abe pun menuturkan bahwa negara-negara yang perekonomiannya berkembang pesat di Asia telah membuka ekonominya masing-masing, sehingga bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat membuka peluang Jepang di Asia. (BBC, 2013)

Penting bagi Jepang untuk tetap menjaga kekuatan ekonomi di Asia. Dalam perannya, Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengartikulasikan strategi pertumbuhan ekonomi multi-cabang di mana liberalisasi perdagangan dan pengejaran perjanjian perdagangan bebas, termasuk *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah bahan utama. Selain itu, Perdana Menteri Shinzo Abe telah menempatkan barisan kuat eksekutif pro pemerintah dan partai *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di Toshimitsu Motegi sebagai Menteri Ekonomi, Perdagangan,

dan Industri; Yoshimasa Hayashi sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Masahiko Komura sebagai wakil presiden *Liberal Democratic Party* (LDP). Perdana Menteri Shinzo Abe menerima bahwa kunci keberhasilan pemerintahannya dan popularitas publik yang berkelanjutan adalah mempertahankan prospek kuat untuk pertumbuhan ekonomi Negara Jepang. Sementara perlambatan dalam ekonomi Jepang mungkin membuat *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bahkan lebih dari keharusan ekonomi. Perdana Menteri Shinzo Abe akan merasa lebih sulit secara politis untuk memenuhi strategi perdagangannya jika kesulitan ekonomi melemahkan dukungan publik untuk pemerintahannya (Abe, 2013).

Pada era pasca Perang Dunia II, Jepang telah mengubah dirinya menjadi industri terkemuka bangsa. Industri manufaktur, termasuk industri otomotif, telah menjadi industri terkemuka untuk Jepang. Namun, industrialisasi yang cepat menyebabkan urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari daerah pedesaan ke perkotaan. Akibatnya, sektor pertanian diserahkan kepada pekerja lanjut usia. Sementara itu nilai tambah dari produk pertanian jauh lebih rendah, menyebabkan semakin sedikit menarik bagi generasi muda. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang kompetitif. Sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah Jepang telah telah mengambil sejumlah kebijakan perlindungan, termasuk subsidi besar, untuk melindungi para petani. Namun, pada abad ke-21, globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi aturan hari ini, dan Jepang juga harus bergabung dengan itu. Untuk mengantisipasi masuknya harga rendah impor produk pertanian, pemerintah Jepang mengimplementasikan kebijakan tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk memberdayakan para petani, dan untuk membuat sektor pertanian di Jepang lebih kompetitif (Nurdiniyah, 2019).

Namun, dalam proses bergabungnya Jepang, pro dan kontra yang terjadi dalam lingkup domestik sendiri, yaitu para petani Jepang menentang rencana keikutsertaan Jepang dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena mereka mengkhawatirkan dampaknya terhadap sektor pertanian Jepang yang akan terpukul dengan banjirnya produk pertanian impor yang lebih murah. Bagi Jepang pertanian ialah kepentingan nasional yang sangat fundamental. Alasan mengapa sektor pertanian dianggap sensitif sebenarnya beraneka ragam dengan latar

belakang politis, social serta bisnis. *Liberal Democratic Party* (LDP) dan *Social Democratic Party of Japan* (SDPJ) dua partai besar di Jepang, sudah sejak lama bergantung dengan suara petani dalam pemilihan umum. Karena hal itu, pemberian subsidi kepada para petani menjadi salah satu prioritas mereka dalam rangka menjaga kepercayaan dan terutama apa yang disuarakan oleh para petani. Partai *Liberal Democratic Party* (LDP) yang awalnya dibentuk untuk menentang masuknya Jepang ke dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ("kelompok yang menuntut penarikan segera dari partisipasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP)"), yang mencakup lebih dari 60% anggota Diet *Liberal Democratic Party* (LDP), kemudian telah mengubah tujuannya menjadi "kelompok yang akan melindungi nasional agar tertarik pada negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), "dengan demikian menggeser target kebijakannya menjadi negosiasi kondisi. *Liberal Democratic Party* (LDP) juga berulang kali menegaskan bahwa mereka akan melindungi pengecualian untuk mendapatkan dukungan partai dari organisasi yang menentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP), seperti koperasi pertanian, sementara pemerintah meyakinkan sektor pertanian bahwa pengecualian akan dicari untuk lima item utama (beras, gandum, daging sapi, produk susu, dan pemanis) yang telah dilindungi oleh sejarah panjang Jepang.

Namun pemerintah Jepang juga berusaha untuk mengurangi dampak liberalisasi perdagangan, yaitu dengan memberikan pembayaran sampingan yang ditawarkan kepada produsen pertanian domestik (disebut "penanggulangan") untuk mengurangi dampak liberalisasi perdagangan. Sehingga memfasilitasi masuknya Jepang ke dalam perjanjian perdagangan bebas. Pemerintah Shinzo Abe telah berjanji untuk memperluas subsidi pendapatan yang dibayarkan langsung kepada petani dan menggandakan pendapatan pertanian dalam sepuluh tahun ke depan. Namun, satu perhitungan menunjukkan bahwa jika tarif pada lima item utama dihapuskan, pemerintah akan membutuhkan 2 triliun yen (\$ 20 miliar) per tahun hanya untuk mensubsidi petani padi. Pemerintahan Shinzo Abe juga dapat berupaya untuk memberikan kompensasi kepada petani melalui langkah-langkah konvensional untuk daging babi (Yoshimasa, 2013).

Sedangkan bagi pihak domestik yang pro, rencana bergabungnya Jepang dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ini dianggap sebagai upaya untuk

meningkatkan perekonomian Jepang dan merupakan strategi baru bagi pembangunan Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara mengatakan bahwa konsep Kemitraan TPP termasuk sekutu kunci Jepang, Amerika Serikat dapat membantu mendorong usaha-usaha yang dilakukan Jepang untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas guna meningkatkan ekspor. “Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik merupakan kerangka kerja menjanjikan bagi integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” kata Maehara dalam sebuah acara konferensi bisnis Jepang-AS di Tokyo (Sidik, 2010).

Perdana Menteri Shinzo Abe pun dihadapkan dilema antara memilih untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan membuka pasarnya secara bebas atau tetap mempertahankan kebijakan proteksionismenya mengingat saat ini kondisi ekonomi Jepang sedang menurun. Meskipun demikian, hingga akhir dinyatakan persetujuan mengenai *Trans-Pacific Partnership* (TPP), Jepang masih teguh mempertahankan kebijakan proteksionismenya, terutama dibidang agrikultur. Sektor pertanian Jepang sangat dilindungi karena adanya beberapa faktor seperti semakin meningkatnya penduduk Jepang sehingga memerlukan semakin banyak kebutuhan pangan dan semakin menyempitnya lahan pertanian karena adanya industrialisasi (Harada, 2019).

Pada awalnya Amerika Serikat merupakan negara yang sangat aktif mengajak Jepang untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan berbagai macam caranya yaitu memaparkan keuntungan apabila bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Namun kemudian tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena adanya pergantian kepemimpinan yang semulanya Amerika dipimpin oleh Obama dan sekarang pada kepemimpinan baru digantikan oleh Donald Trump. Padahal, selama pemerintahan Presiden Barack Obama, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kesepakatan perdagangan untuk mengikat mitra dan aliansi perdagangan Amerika Serikat untuk menandingi ekspansi China. Sebanyak 12 anggota TPP merepresentasikan 40% ekonomi dunia. Serta pada kepemimpinan Presiden Barack Obama Amerika menjadi Negara yang terus mendorong keikutsertaan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Sebelumnya Trump sudah menyatakan bahwa pada kampanyenya apabila dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dia akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian dagang regional *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dalam pandangan Trump ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Amerika Serikat karena terjadinya peningkatan pengangguran. Trump berjanji mengadakan renegotiasi Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dengan Meksiko dan Kanada. Keputusan eksekutif Trump tentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebenarnya adalah simbolik semata. Pasalnya, kesepakatan itu belum diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik. Trump berulang kali menegaskan, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) berpotensi menimbulkan bencana bagi Amerika Serikat karena mengganggu perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Politikus Partai Demokrat Senator Bernie Sanders mengatakan kepada BBC, dia mendukung keputusan Trump tersebut (Rai, 2017)

Namun Jepang tetap pada keputusannya untuk bergabung tepat pada tanggal 13 Maret 2013 Shinzo Abe mendeklarasikan niatan pemerintah untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan secara resmi diakui sebagai anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ketika Negara Jepang mengikuti perundingan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di Malaysia untuk pertama kalinya pada tanggal 23-25 Juli 2013. Putaran terakhir negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), 5 oktober 2015 Jepang kemudian menyetujui untuk meningkatkan impornya tapi tetap membatasi impor bagi komoditas sektor agrikultur, yaitu beras. Majelis Rendah Jepang memutuskan untuk meratifikasi kemitraan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pemungutan suara dilakukan di sidang umum spesial yang dilaksanakan pada hari Kamis. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di dukung oleh partai perdana menteri Shinzo Abe Liberal Demokrat, partai Komeito, dan Partai Inovasi Jepang. Partai Komunis Jepang menjadi satu-satunya partai yang menolak, sementara Partai Demokratik, Partai Liberal, dan partai Sosial Demokrat memboikot pemungutan suara. (kevin, 2016)

Dalam pengambilan suatu keputusan, akan muncul beberapa pertimbangan. Begitu pula yang dihadapi negara Jepang dalam keputusannya untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Sebelum membuat keputusan untuk bergabung, Jepang telah memikirkan keuntungan dan kerugiannya bahkan faktor internal maupun eksternal juga akan menjadi suatu pertimbangan. Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan Jepang untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) tentunya ingin mendapatkan keuntungan ekonomi bagi negaranya. Berikut tabel keuntungan dan kerugian apabila menjadi anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan tidak menjadi anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Tabel 4.2 Menjelaskan Tentang Pertimbangan Rasional Jepang Bergabung dalam Keanggotaan <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP)		
Pilihan	Keuntungan	Kerugian
Bergabung atau tidak Bergabungnya Jepang dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang investasi Jepang antara anggota yang bergabung dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP). - Mendorong persaingan yang sehat di area perdagangan bebas. - <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP) menjadi sebuah wadah untuk Jepang dalam memperluas mitra ekonominya dan mengembangkan perekonomian negaranya. - Adanya market share atau penyebaran pasar di <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP) yang akan memberikan pengaruh pada tingkat ekspor maupun impor yang dilakukan Jepang dalam aktivitas perdagangan global. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jepang harus menanggung biaya dengan mengorbankan sektor pertanian karena dengan bergabung dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP). Tentunya sektor pertanian Jepang akan bersaing dengan anggota-anggota yang ada dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP). - Jepang harus menghadapi tekanan kontra dari pihak domestik (terutama dari golongan petani) karena adanya impor beras asing yang

	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya akses pasar yang besar dengan kesepakatan dagang yang berkualitas akan memberikan manfaat yang meluas, terutama melalui fasilitas arus barang dan jasa. - Adanya integrasi ekonomi untuk meningkatkan ekonomi perekonomian Jepang dan dapat menjadi strategi terbaru untuk pembangunan Jepang. (Sidik, 2010) - Terciptanya tatanan ekonomi baru Jepang dan anggota dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP) terkhusus pembentukan perdagangan yang lebih komperhensif dan saling menguntungkan. - Di dalam stabilitas kawasan Asia Pasifik dengan bergabungnya Jepang di <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP) maka akan memberikan kekuatan tersendiri bagi Jepang untuk semakin dominan dan menjadi negara yang berperan di kawasan tersebut. - Adanya perlindungan yang memadai dan efektif dalam penegakan hak kekayaan intelektual di negara anggota 	<p>lebih murah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya pasar bebas ekspor dan impor mengkhawatirkan beberapa konsumen domestik karena akan adanya kesehatan makanan impor yang lebih rendah yang mana hasil produksinya beda dari produksi dalam Negeri Jepang.
--	---	---

	<p><i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa perdagangan apabila terjadi antara di <i>Trans-Pacific Partnership</i> (TPP) 	
--	--	--

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keputusan Perdana Menteri Shinzo Abe masuk dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena sudah mempertimbangkan beberapa keuntungan dan kerugian yang dijabarkan dalam tabel. Dan dapat kita lihat bahwa keuntungan Jepang untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) lebih banyak dibandingkan dengan kerugiannya. Seperti model actor rasional yang digunakan dalam kerangka pemikiran penulisan skripsi ini yang menyatakan bahwa aktor yang menjadi pembuat keputusan tentunya akan lebih memfokuskan keuntungan negaranya daripada menanggung banyak kerugian bagi negaranya sendiri. Dalam pembahasan bab ini, penulis menjelaskan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam memutuskan keputusannya untuk tetap bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

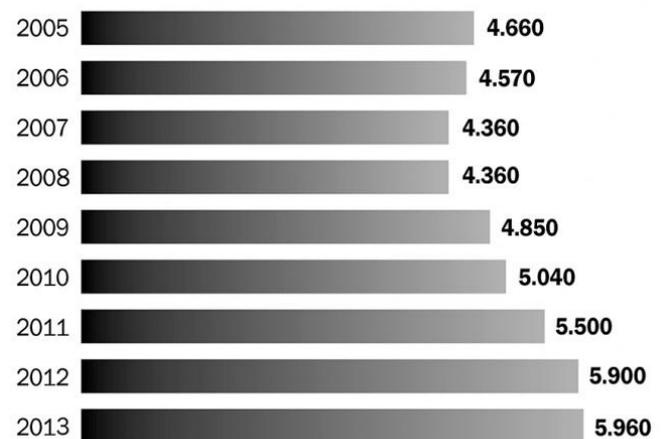
Jepang merupakan negara yang sudah banyak menjalin hubungan kerjasama antar Negara. Salah satu perjanjian dagang yang membuat Jepang ingin bergabung yaitu Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Pemberlakuan Perjanjian dagang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan memungkinkan Jepang dengan mudah memenuhi sasaran PDB nominal administrasi Abe sebesar 600 triliun yen. Efek pertumbuhan yang menonjol dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dikarenakan selain deregulasi perdagangan barang, deregulasi perdagangan jasa (ritel, keuangan, kekayaan intelektual, dll). Serta investasi asing akan memiliki dampak besar pada ekonomi. Selain itu, integrasi ekonomi lebih lanjut

akan membawa lebih banyak komunikasi tatap muka lintas batas. Oleh karena itu, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi abadi dengan mempromosikan inovasi melalui pemanfaatan pengetahuan orang luar (Todo, 2015).

Dilihat dari perspektif tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada bagaimana *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan peningkatan ekonomi pada Jepang di wilayah Asia Timur. Seperti yang diketahui kesepakatan luas tentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah tidak hanya akan menurunkan tarif pada produk otomotif dan lainnya, tetapi juga akan menderegulasi perdagangan jasa dan investasi asing. Di bidang investasi asing dan perdagangan jasa seperti ritel dan keuangan. Pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebagai aturannya akan menggunakan daftar negatif. Dengan kata lain, semua area bisnis akan di deregulasi selain dari yang secara spesifik terdaftar oleh masing-masing negara. Di Vietnam dan Malaysia, peraturan modal asing akan dilonggarkan. Ini akan mendorong perusahaan Jepang untuk memasuki pasar luar negeri dan semakin memperdalam jaringan produksi perusahaan Jepang di Asia, dan akan meningkatkan pendapatan rakyat Jepang. Perlindungan yang lebih kuat terhadap hak kekayaan intelektual di negara-negara anggota juga harus meningkatkan ekspor teknologi Jepang dan properti yang dilindungi hak cipta (Todo, 2015).

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) JEPANG

(US\$ miliar)



SUMBER: TRADING ECONOMICS

Gambar 4.3 Grafik Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang

Sumber: Koran Tempo, 2014.

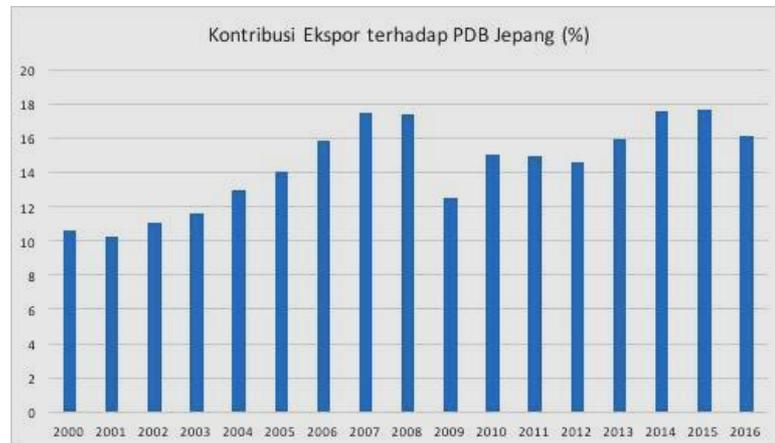
Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Peningkatan ekonomi Jepang dari tahun 2005 hingga tahun 2013-an mengalami beberapa perubahan, yaitu ditahun 2005 hingga tahun 2008 ada penurunan. Tetapi, mulai pada tahun 2009 sampai 2013 Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang terus merangkak naik. Yang kemudian pada tahun 2013 Jepang memutuskan bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sehingga ada peningkatan lagi semula di tahun 2012 Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 5.900 dan pada 2013 yaitu mencapai 5.960.

Beberapa keuntungan lain yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Jepang dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dapat dilihat dari data pemerintah Jepang yang dirilis pada Senin 14 November 2016 memperlihatkan perekonomian negara Jepang naik melebihi perkiraan pada kuartal III 2016. Hal ini dikarenakan ekspor mengimbangi belanja konsumen. Kantor Kabinet Jepang menjelaskan laju perekonomian meningkat 0,5% pada kuartal antara Juli dan September 2016, serta naik 2,2% secara tahunan. Data tersebut melampaui ekspektasi pasar untuk tingkat pertumbuhan kuartalan 0,2% atau tahunan sebesar 0,8%. Perekonomian Jepang mengalami kontraksi dalam tiga bulan terakhir pada 2015, sebelum kemudian meningkat 0,5% pada triwulan pertama 2016 dan berekspansi 0,2% pada April-Juni. Kohei Iwahara, ekonom Natixis Jepang Securities mengatakan:

“Pertumbuhan Kuartal III merupakan sebuah kejutan yang positif, hal ini melegakan bagi para pembuat kebijakan Jepang. Namun ekspor berkontribusi seluruh pertumbuhan, terutama peningkatan di zona euro. Saya perkirakan perlambatan terjadi pada kuartal IV,”

Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat, termasuk kemungkinan terhentinya perjanjian perdagangan yang menjadi upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghidupkan kembali pertumbuhan yang mana karena pergantian

kepemimpinan di Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang diyakini bahwa kesepakatan ini merugikan tenaga kerja Amerika Serikat (Leo, 2016).



Gambar 4.4 Grafik Kontribusi Ekspor Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang

Sumber: World Bank, 2019.

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Ekspor Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang sebelum tahun 2013 dimana Jepang memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mengalami penurunan, yang sebelumnya sudah mengalami peningkatan di 2008 dan tiba-tiba turun di 2009. Keputusan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) memberikan peningkatan kontribusi ekspor Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang yang mulai beranjak meningkat di tahun 2014.

Jepang merupakan negara yang sangat dikenal dengan laju perkembangan industri otomotifnya sehingga dengan adanya *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sangat memudahkan serta menguntungkan Jepang dimana ia akan mendapat manfaat dari pengurangan tarif untuk ekspor mereka. Selain itu, mereka akan diizinkan untuk membeli lebih banyak suku cadang untuk produk mereka dari Asia, termasuk, secara signifikan, dari negara-negara yang tidak termasuk dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Aturan asal hanya mensyaratkan 45 persen kendaraan dibuat di zona *Trans-Pacific Partnership* (TPP); dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), angka yang setara adalah 62,5

persen. Mampu membeli suku cadang yang lebih murah dari negara-negara seperti Cina, dan kemudian menjual kendaraan dengan tarif yang lebih murah ke pasar seperti Amerika Serikat, baik untuk industri otomotif Jepang (Pollmann, 2015). Dengan keluarnya Amerika Serikat dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan sesuatu yang dominan untuk Jepang dimana diantara negara-negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yaitu Australia, Brunei Darusalam, Kanada, Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam, Jepang sangat diakui dalam industri otomotifnya. Hal ini menjadi peluang bagi Jepang untuk lebih menguntungkan pasar otomotifnya di wilayah Asia Timur dan negara-negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Ketiga, penurunan tarif di pertanian, susu, dan barang-barang lainnya akan membantu menurunkan biaya barang-barang ini kepada konsumen Jepang. Satohiro Akimoto, Wakil Presiden Senior dan Manajer Umum Hubungan Global di Mitsubishi Corporation mengatakan:

“kesimpulan TPP seperti mimpi yang menjadi kenyataan untuk Jepang karena dorongan yang akan diberikannya pada bisnis. Perjanjian tersebut akan menyediakan ruang untuk bisnis baru di Jepang, terutama ketika menyangkut ekspor pertanian. Pertanian dianggap sebagai area yang perlu dilindungi Jepang. Namun mungkin merupakan area yang dapat dimanfaatkan Jepang untuk memberi energi pada ekonomi Jepang. Selain itu, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan memberikan lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan fleksibel yang akan memungkinkan bisnis untuk mendekati organisasi rantai pasokan secara lebih strategis. Perubahan tersebut memainkan peran penting dalam reformasi struktural panah ketiga "Abenomics" dan akan menjadi penting dalam merevitalisasi ekonomi Jepang.” (Satohiro, 2016)

Keempat, penyelesaian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan memberi Jepang pengungkitan untuk segera menyimpulkan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Misalnya, negosiasi Jepang dengan Uni Eropa dapat dipercepat oleh keinginan Uni Eropa untuk tidak ditinggalkan (Pollmann, 2015).

Trans-Pacific Partnership (TPP) sering dianggap paling penting sebagai perjanjian perdagangan, tetapi salah satu kontribusi terpenting dari perjanjian itu

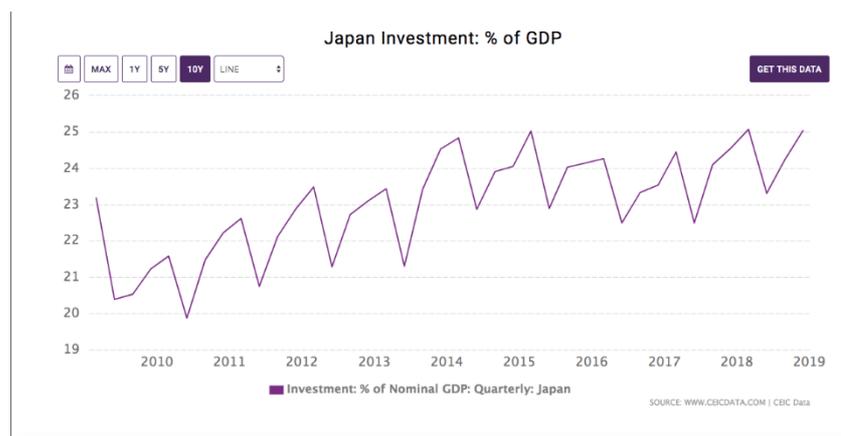
adalah untuk memfasilitasi investasi asing langsung *Foreign Direct Investment* (FDI). *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan memengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan dua cara berbeda. Pertama, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan mencakup ketentuan yang secara langsung mengurangi hambatan untuk investasi dengan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, menghilangkan hambatan untuk investasi dalam layanan, dan meningkatkan konsistensi dan transparansi rezim pengatur di seluruh negara mitra. Kedua, mengurangi hambatan perdagangan meningkatkan *Foreign Direct Investment* (FDI) hanya karena perdagangan dan investasi merupakan pelengkap. Delapan puluh persen dari semua perdagangan di dunia saat ini terjadi di antara afiliasi perusahaan multinasional (MNC) atau dalam rantai pasokan yang dikelola oleh perusahaan multinasional.

Trans-Pacific Partnership (TPP) akan membuka jalan bagi revitalisasi ekonomi Jepang dengan membantu memperluas ekspor dan investasi di negara-negara Asia-Pasifik dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Karena *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan mewujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang berjangkauan luas, perusahaan-perusahaan Jepang akan dapat memperluas ekspor dan mengarahkan investasi di negara-negara anggota lainnya. Sebagian besar ekspor Jepang adalah produk industri, dan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) kemungkinan akan mendorong ekspor Jepang dalam produk industri karena 11 mitra dagangnya, mereka yang merupakan pihak dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP), akan menghilangkan tarif pada 99,9% produk industri. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) juga akan menghapus tarif 98,5% dari produk pertanian dan dengan demikian menghasilkan peningkatan ekspor dalam produk pertanian yang kompetitif (Urata, 2016).

Bagi perusahaan Jepang, manfaat terbesar *Trans-Pacific Partnership* (TPP) mungkin akan datang dari liberalisasi investasi langsung asing. Anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) menyetujui prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi terhadap perusahaan asing dan lapangan permainan yang seimbang untuk perusahaan domestik dan asing. Khususnya, anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan dilarang memaksakan transfer teknologi dan persyaratan kinerja lainnya pada investor asing di wilayah mereka. Juga, mereka akan diminta

untuk membuka pasar pengadaan pemerintah mereka kepada perusahaan asing dan menghapuskan bantuan kepada perusahaan milik negara yang menyebabkan efek buruk pada perusahaan asing. Aturan-aturan itu akan memfasilitasi entri perusahaan Jepang ke negara-negara anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) lain dan memungkinkan mereka untuk beroperasi secara efisien (Urata, 2016).

Beberapa perusahaan Jepang telah menghasilkan pendapatan yang signifikan dari operasi mereka di luar negeri, dan sebagian dari pendapatan yang diperoleh di luar negeri sedang dipulangkan ke Jepang dan diinvestasikan dalam pengembangan produk dan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan menciptakan lingkungan bisnis lintas batas yang lebih baik, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan daya saing mereka dan mencapai pertumbuhan. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) akan mempromosikan revitalisasi ekonomi Jepang dengan membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk memperluas ekspor dan mengarahkan investasi. Liberalisasi penuh sektor pertanian walaupun tidak disadari kali ini akan membuka jalan bagi revitalisasi penuh ekonomi Jepang. Untuk lebih membuka pasar pertanian dan meningkatkan daya saing segmen ekonomi ini, kita harus menerapkan semua reformasi struktural yang diperlukan di sektor ini dengan baik dan tanpa gagal (Urata, 2016).



Gambar 4.5 Grafik Investasi Jepang

Sumber: Japan Investment: % of GDP, 2010-2019

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa ada penurunan investasi Jepang ditahun 2010, yang kemudian mulai beranjak naik. Dimana pada tanggal 26 juli 2013 Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan untuk Jepang bergabung

dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dengan bergabungnya Jepang, investasi Jepang pun mengalami peningkatan dan relatif stabil dalam kurun waktu 2013-2018 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dan kemudian pada tahun 2017 Amerika Serikat resmi memutuskan mengundurkan diri dari kesepakatan perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Namun, Jepang tetap bertahan dalam keanggotaannya. Hal ini dapat dilihat bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe melihat dan berpikir secara rasional bahwa bertahannya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat terus memberikan peningkatan yang stabil dalam investasinya.

Dengan adanya penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini mengkaji tentang mengapa Perdana Menteri Shinzo Abe tetap memutuskan untuk bertahan dalam keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP) meskipun Amerika Serikat berencana untuk keluar. Hal tersebut dibuktikan pada bab IV mengenai pertimbangan rasional apa saja yang sudah melatar belakangi Perdana Menteri Shinzo Abe tetap pada keputusannya untuk bertahan dalam keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP). Yang di dalamnya mencakup beberapa kajian dari Ilmu Hubungan Internasional yaitu ekonomi politik internasional dimana membahas hubungan serta bagaimana interaksi politik dan ekonomi antar Negara, kemudian adanya hubungan diplomasi di antara anggota-anggota yang tergabung dalam suatu perjanjian dagang yang dapat menjadi sebuah wadah untuk mempererat hubungan antar negara. Dengan begitu, penelitian dengan judul “Latar Belakang Keputusan Jepang Masuk dalam Keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP) era Shinzo Abe” ini telah selesai. Namun setelah dilihat dari perspektif negara anggota *Trans Pacific Partnership* (TPP), penelitian ini dapat dikembangkan lagi misalnya “Bagaimana Respon Negara-Negara anggota *Trans Pacific Partnership* (TPP) atas keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP) dan apa dampak yang dirasakan Negara-Negara anggota *Trans Pacific Partnership* (TPP) tanpa adanya Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement for Cooperation Between the Government of Japan and the Government of the United States of America Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy.* (n.d.). Retrieved from http://www.jnmcc.or.jp/pdf/nichi_bei_kyoutei.pdf
- AmCham. (2014, April 4). *The Big Benefits of Japan's Joining the TPP Negotiations.* diakses pada <https://www.amchamvietnam.com/the-big-benefits-of-japans-joining-the-tpp-negotiations/>
- Andri. (2013). *Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans-Pacific Partnership Periode 2011-2013.* Thesis, Department of International Relation, Jakarta.
- Asia Society (2016, Maret 14). *How the Trans-Pacific Partnership Benefits Japan.* Diakses pada <https://asiasociety.org/blog/asia/how-trans-pacific-partnership-benefits-japan>
- Ayu, A. F. (2015). UPAYA JEPANG DIBAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE DALAM. II, 195.
- Bauschard, E. (2019). *History of Relations Between Japan and the U.S.. Sutori.* diakses pada <https://www.sutori.com/story/history-of-relations-between-japan-and-the-u-s>
- BBC. (2013, Maret 15). *Jepang memutuskan masuk ke TPP.* diakses pada detikNews: <https://news.detik.com/bbc-world/d-2195319/jepang-memutuskan-masuk-ke-tpp>
- Bureau, S. (2016). *Ministry of Internal Affairs and Communications.* Statistical Handbook of Japan.
- Dasuki, A. (1963). *Sejarah Djepang Jilid 2..* Bandung: Balai Pendidikan Guru.
- Defite, R. (1998). *Japan's Foreign Policy for the 21st Century: from Economic Superpower to What Power?.* New York: ST.Martin's Press.
- Eko. (2017, Januari 24). *Amerika Serikat Resmi Mundur dari Trans-Pasific Partnership.* Tempo. Diakses pada <https://dunia.tempo.co/read/839055/amerika-serikat-resmi-mundur-dari-trans-pasific-partnership/full&view=ok>

- Elms, D. D. (2012). *“The Trans Pacific Agreement (TPP) Negotiation: Overview and Prospect”*. Rajaratnam School Of International Studies.
- Elms, Deborah d. C. L. L. (2012). *The Trans Pacific Agreement (TPP) Negotiation: Overview and Prospect*. Rajaratnam School Of International Studies.
- International Monetary Fund. (2002). *The Japanese Banking Crisis of the 1990s. sources and lessons IMF Working paper*.
- Goldstein, J. (2019.). *International Relations*. Longman, New York.
- Green, M. J. (2003). *Japan's Reluctant Realism*. New York: Palgrave.
- Hall, R. B. (1962). *Japan Industrial Power*. New York: VanNostrad Company.
- Harada, Y. (2019). *Japan's Agriculture and the TPP*. Tokyo Foundation and Waseda University, Tokyo.
- Harada, Y. (2013). *Japan's Agriculture and the TPP*. Tokyo: Tokyo Foundation and Waseda University.
- Irsan, A. (2005). *Politik Domestik, Global dan Regional Jepang*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Proses Integrasi Ekonomi Kawasan Asia-Pasific*. diakses pada <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/pages/trans-pacific-partnership-Trans-Pacific-Partnership-dan-proses-integrasi-Ekonomi-Kawasan-Asia-Pasifik.aspx>
- Kevin, W. (2016, November 11). *Akhirnya, Jepang Ratifikasi Perjanjian TPP..... Setelah Trump Jadi Presiden!. Kaorinusantara*. diakses pada <https://www.kaorinusantara.or.id/newslines/63625/akhirnya-jepang-ratifikasi-perjanjian-tpp-setelah-trump-jadi-presiden>
- Lamarque, K. (2017, Januari 24). *Presiden Trump Tarik Amerika Serikat dari Kemitraan TPP*. VOA Indonesia. Diakses pada <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-trump-tarik-as-dari-kemitraan-tpp/3689606.html>
- Leo. (2016, November 15). *Pertumbuhan Ekonomi Jepang Meningkat*. Beritasatu. diakses pada <https://id.beritasatu.com/home/pertumbuhan-ekonomi-jepang-meningkat/152675>

- Mauliana, V. A. (2017, January 21). *Usai Pelantikan Donald Trump, AS Umumkan Keluar dari TPP*. Liputan6. diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2833553/usai-pelantikan-donald-trump-as-umumkan-keluar-dari-tpp>
- Mas'ood, M. (1994). *MoIlmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta:PT. Pustaka LP3ES.
- Mulgan, A. G. (2013, July 12). *Japan's Entry into the Trans-Pacific Partnership*. The National Bureau of Asian Research. diakses pada <https://www.nbr.org/publication/japans-entry-into-the-trans-pacific-partnership/>
- Nisihihara, M. (1991). *New Roles for the U.S.-Japan Security Treaty*. Tokyo.
- Nurdiniyah, H. (2019.). Kebijakan perdana menteri shinzo abe dalam mendukung sektor pertanian dan kaitannya dengan keikutsertaan jepang dalam perundingan trans pacific partnership tpp.
- Office of the United States Trade Representative. (2015, April 10). *Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement*. diakses pada <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership>
- Office of the United States Trade Representative. (2015, Oktober). *Summary of the Trans Pacific Partnership Agreement*. diakses pada <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership>
- Ochno, K. (2016). *The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a Developing Country*. GRIPS Development Forum.
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2013, Februari 22). *Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe during His Visit to the United States of America,*”. diakses pada http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/statement/201302/22kaiken_e.htm
- Pollmann, M. (2015, Oktober 8). *What the TPP Means for Japan*. The Diplomat: diakses pada <https://thediplomat.com/2015/10/what-the-tpp-means-for-japan/>

- Pyle, K. B. (2019). *Japan's Emerging Strategy in Asia dalam Ellings and Simon (eds), Southeast Asian Security in the New Millenium.*
- Rai. (2017, januari 25). *Amerika Serikat Resmi Keluar dari TPP.* Okezone. diakses pada <https://economy.okezone.com/read/2017/01/25/320/1600285/amerika-serikat-resmi-keluar-dari-tpp>
- Reischauer, E. (1982). *JAPAN: The Story of a Nation.* (C. E, Ed.) Tokyo.
- Reischauer, E. O. (1990). *Tradition And Transformation.*
- Sanusi. (2013, Oktober 07). *Ini Jurus PM Shinzo Abe Pulihkan Ekonomi Jepang.* Kompas. diakses pada [https://ekonomi.kompas.com/read/2013/10/07/2119153/Ini.Jurus.PM.Shinzo.Abe.Pulihkan.Ekonomi.Jepang.:](https://ekonomi.kompas.com/read/2013/10/07/2119153/Ini.Jurus.PM.Shinzo.Abe.Pulihkan.Ekonomi.Jepang.)
- Schott, J. J., Cimino-Isaacs, C., & Jung, E. (2016). *Implications of the Trans Pacific Partnership for the World Trading System.* PIIE (Peterson Institute for International Economics).
- Schwab, S. C. (2008, september). *Schwab statement launch US negotiations join Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement.* Office of the United States Trade Representative. diakses pada <https://ustr.gov/schwab-statement-lunch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement>
- Sektor pariwisata,serta industri jasa.* (2017 йил march). From www.japan.gpo.jp.abenomics.
- Sidik, J. M. (2010, Oktober 7). *Jepang akan bergabung perdagangan bebas Asia-Pasifik.* Antanews. diakses pada <http://www.antaranews.com/berita/227206/jepang-akan-bergabung-perdagangan-bebas-asia-pasifik>
- Sukmana, Y. (2015, November 12). *Apa Alasan AS 'Membajak' Trans-Pacific Partnership.* Kompas. diakses pada <https://money.kompas.com/read/2015/11/12/061400826/Apa.Alasan.AS.Membajak.Trans-Pacific.Partnership>
- Soesastro, H. (1990). *Perkembangan Ekonomi Asia.* Jakarta: CSIS.

- Stockwin, J. (1984). *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sueo, S. (1992). *The Fukuda Doctrine : New Dimension in Japanese Foreign Policy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Todo, Y. (2006). Knowledge spillovers from Foreign Direct Investment in R&D: Evidence from Japanese firm-level data. *Journal of Asian Economics*, 996-1013.
- Todo, Y. (2015, Desember 24). *How TPP will change the Japanese economy*. VOX CEPR Policy Portal. diakses pada <https://voxeu.org/article/how-tpp-will-change-japanese-economy>
- Triharso, A. (2018.). *tt. Jepang*. Diakses pada http://ergy-g-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-46196-MBP%20Asia%20Timur-Perkembangan%20Ekonomi%20dan%20Politik%20Jepang.html
- The Straitsstimes. (2017, Januari 24). *US exit from TPP: What it means and what could happen next*. diakses pada <https://www.straitstimes.com/world/united-states/5-things-to-know-about-trans-pacific-partnership-tpp-free-trade-pact>
- Urata, S. (2016, Februari 16). *The Trans-Pacific Partnership Agreement as a vehicle for revitalising the Japanese economy and rebuilding the world trade regime*. VOX CEPR Policy Portal. diakses pada <https://voxeu.org/article/trans-pacific-partnership-and-revitalisation-japanese-economy>
- Urike, S. (1996). *The 1995 Financial Crisis in Japan* . working paper.
- Vogel, E. F. (2019). *Japan as Number One in Asia*.
- World Bank. (2019.). *Trans-Pacific Partnership versus Regional Comprehensive Economic Partnership: control of membership and agenda*. diakses pada <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/152753/reiwp-146.pdf>
- Yoshimasa, H. (2013). “Norin suisan daijin, TPP o kataru ‘Seme no norin suisangyo’ no tenkai ni mukete” [MAFF minister talks about the TPP “in working toward developing agricultural, forestry, and fishery industries on the offensive”].

- Yoshioka, Shinji, & Hirofumi, K. (2018). *Japan's High-Growth Postwar Period: The Role of Economic Plans*. Economic and Social Research Institute.
- Yuan, W. J. (2012). *The Trans-Pacific Partnership and China's Corresponding Strategies*. A Freeman Briefing Report.
- Zakky. (2017, Desember 13). *Daftar Negara Anggota APEC (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik)*. diakses <https://www.zonareferensi.com/negara-anggota-apec/>